I N O V A S I - 16 (1), 2020; 127-132
http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI

Kondisi struktur ketenagakerjaan di jawa timur dalam rangka mempersiapkan permintaan sektor lapangan usaha

Ilham Robbi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: wentira86@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melihat kondisi tenaga kerja di Jawa Timur. Hasil estimasi regresi logistic menunjukkan semakin tingginya pendidikan angkatan kerja peluang untuk mendapatkan pekerjaan 1, 0357 kali dari yang tidak sekolah. Sedangkan angkatan kerja yang pernah mengikuti pelatihan/kursus probabilitas 1,54 kali untuk bekerja akan semakin tinggi daripada yang tidak pernah ikut pelatihan/kursus.

Kata Kunci: Struktur ketenagakerjaan; tenaga kerja; pelatihan probabilitas

The condition of the employment structure in East Java in order to prepare the demand for the business sector

Abstract

This study aims to look at labor conditions in East Java. The results of the logistic regression estimation show that the higher education of the workforce has the opportunity to get a job 1, 0357 times that of those without school. Whereas the workforce that has attended training / courses the probability of 1.54 times to work will be higher than those who have never attended training / courses.

Keywords: *employment structure; labor; probability training*

PENDAHULUAN

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah provinsi Jawa Barat dengan jumlah 39.292.972 Jiwa (BPS Jatim, 2018). Banyaknya jumlah penduduk di Jawa Timur dapat menjadikan potensi penawaran tenaga kerja yang tinggi, tetapi juga di sisi lain dapat menjadi beban karena meningkatkan angka pengangguran. Dari jumlah penduduk tersebut menurut BPS (2018) sebanyak 20.937.716 merupakan angkatan kerja. Jawa timur menjadi daerah yang memiliki kegiatan ekonomi tertinggi di seluruh pulau Jawa setelah ibu kota provinsi, bahkan tingkat nasional. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi diatas pertumbuhan nasional. Seperti gambar 1 dibawah ini

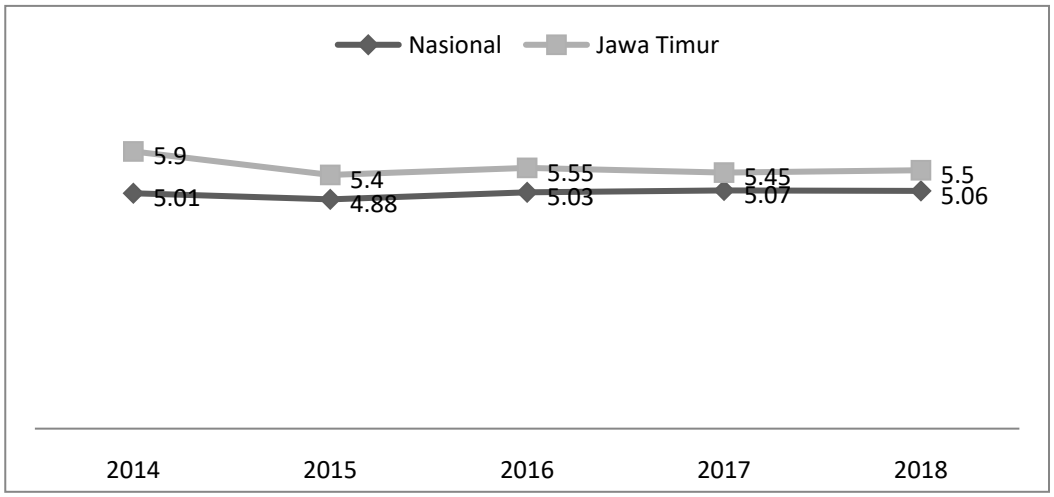

Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi jatim 2014-2018 (%)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur salah satunya didorong oleh banyaknya nilai investasi yang masuk baik dari sektor PMDN (penanaman modal dalam negeri) maupun PMA (penanaman modal asing) (Suindyah D, 2011). Nilai PMDN yang masuk pada tahun 2017 sebesar 45.044,5 miliar rupiah tertinggi kedua setelah DKI Jakarta 47.262,3 miliar rupiah (Statistik Indonesia, 2018). Walaupun nilai PMA yang masuk Jatim (2015-2017) mengalami penurunan 2.523,4 juta US $; 1.941 juta US $; dan 1.566,7 US $. Terlihat bahwa besarnya nilai investasi di Jawa Timur seharusnya dapat membantu pemerintah provinsi untuk mengurangi pengangguran terbuka sebesar 838.496 jiwa (BPS Jatim, 2018). Sekarang tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi ataupun kemampuan SDM individu masyarakat Jawa Timur bisa bersaing untuk memperebutkan kesempatan tersebut..

Menurut Astuti (2014) sektor industri pengolahan dapat mendorong sektor jasa dan pertanian. Dilihat dari lapangan usaha yang dominan di Jawa Timur adalah sektor industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, dan pertanian;kehutanan;perikanan. Seperti ditunjukkan PDRB provinsi Jawa Timur pada table 1 PDRB menurut lapangan usaha 2014-2017.

Tabel 1. PDRB Menurut Lapangan Usaha 2014-2017 (%)

Lap Usaha	2014	2015	2016	2017
Industri Pengolahan	28,95	29,31	28,91	29,12
Perdagangan Besar & Eceran	17,34	17,6	17,9	17,93
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,56	13,65	13,49	12,84
Konstruksi	9,49	9,49	9,72	9,79

Terlihat bahwa sektor industry pengolahan yang memberi sumbangan terbesar atas PDRB jawa timur pada tahun 2017 sebesar 29,12%, kemudian disusul perdagangan besar & eceran 17,93%, pertanian kehutanan perikanan 12,84% dan terakir adalah konstruksi sebesar 9,79%.

Pemerintah provinsi Jawa Timur harus melihat struktur lapangan usaha di Jawa timur yang didominasi oleh sektor industry pengolahan. Ini berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat guna menyerap angkatan kerja di sektor tersebut. Terdapat 38 kab/kota yang memberikan kontribusi angkatan kerja ini di tingkat regional provinsi, oleh karena itu pemerintah provinsi juga harus membagi angkatan kerja tersebut ke sektor lainnya seperti perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Dari sisi penawaran tenaga kerja pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan SDM-nya agar bisa bersaing di wilayah sendiri. Adanya pengembangan ekonomi regional, membuat tidak adanya batasan administrasi antar wilayah.

Merujuk pada teori neoklasik pengembangan ekonomi wilayah dan kota yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah satu proses yang gradual, di mana pada satu saat kegiatan manusia semuanya akan terakumulasi. Tingkat pertumbuhan terdiri dari 3 sumber: akumulasi modal, penawaran tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Implikasi dari persaingan ini adalah modal dan tenaga kerja akan berpindah apabila balas jasa faktor-faktor tersebut berbeda-beda dari provinsi atau wilayah lainnya (Fujita & Thisse, 2002). Persaingan tenaga kerja akan terjadi terlepas dari batas adminsitrasi provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu bagaimana strategi pemerintah provinsi Jawa Timur memperkuat struktur tenaga kerjanya dan dapat bersaing, agar terserap dalam lapangan kerja. Sehingga mengangkat pertumbuhan ekonomi kab/kota maupun secara regional Jawa Timur.

Tinjauan pustaka

Untuk melihat struktur ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat dilihat kondisi penawaran dan permintaan tenaga kerja bagi lapangan usaha yang membutuhkan. Tidak semua tenaga kerja dapat ditampung, hal ini berkaitan dengan skill atau SDM yang dimilikinya. Menurut Jorgensen (1967) akan terjadi pembagian sektor lapangan usaha dalam suatu ekonomi yaitu sektor manufaktur (industry) dan subsisten (pertanian tradisional). Adanya hubungan yang tak simetris antara sektor pertanian dan industri, mendorong surplus tenaga kerja sektor pertanian pindah ke sektor manufaktur. Apabila perpindahan tersebut diikuti dengan kemampuan dan skill, tidak akan menjadi masalah karena akan terserap di sektor industry.

Bowles dan Gintis (1975) mengemukakan teori fungsi sosial, bahwa masyarakat mempunyai suatu pekerjaan yang membutuhkan skill tinggi yang berkaitan dengan besarnya renumerasi, tetapi permintaan tenaga kerja diatur melalui sistem pendidikan dimana yang mempunyai kecakapan lebih akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Teori Crediantialism yang dikemukakan oleh Ivan Berg (1970), bahwa pengusaha tidak memperoleh informasi tentang kinerja karyawan dari latar belakang pendidikan. Bagi pengusaha, pendidikan hanya merupakan indikasi statistik yang secara umum menggambarkan bahwa pendidikan akan berpengaruh terhadap kemampuan kinerjanya. Pengusaha menggunakan ijazah pendidikan sebagai syarat untuk melakukan seleksi.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi BPS, dan data survey angkatan nasional (SAKERNAS) tahun 2017 provinsi Jawa Timur. Untuk menganalisa struktur tenaga kerja yang ada di provinsi menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penelitian kuantitatif menggunakan data cross section guna melihat kecenderungan bekerja atau tidak bekerjanya suatu individu rumah tangga dilihat dari tingkat pendidikan dan pernah atau tidaknya mengikuti pelatihan / kursus menggunakan regresi logistik.

Secara umum model regresi logit dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut :

Model 1 $Lbekerja = f(Li) = f(\beta 0 + \beta 1 Xtingkat\ pendidikan + \ldots + \beta pXpi + \varepsilon i)$

Model 2 $Lbekerja = f(Li) = f(\beta 0 + \beta 2 Xpelatihan\ kursus + \ldots + \beta pXpi + \varepsilon i)$

Variabel dependennya adalah Lbekerja dengan menggunakan kategori biner 0 & 1, dimana 0=tidak bekerja dan 1=bekerja. Sedangkan variable independen adalah β1Xtingkat pendidikan yaitu menggunakan 0=kategori tidak sekolah, 1 = tingkat pendidikan dasar, 2 = tingkat pendidikan menengah, dan 3=tingkat pendidikan tinggi. Kemudian dari model kedua variable independen adalah

β2Xpelatihan kursus menggunakan kategori 0=tidak pernah ikut pelatihan/kursus, dan 1 = pernah mengikuti pelatihan/kursus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil deskriptif terkait struktur tenaga kerja di provinsi Jawa Timur hasil pengolahan data SAKERNAS tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur Tenaga Kerja Prov. Jawa Timur Tahun 2017

	Struktur Tenaga Kerja	Σ	%
1	Tingkat Partisipasi Sekolah		
	Tidak / Belum Sekolah	3.402	6,4
	Sekolah / Pernah Sekolah	49.532	93,6
2	Tingkat Pendidikan		
	Tidak Sekolah	10.485	19,81
	SD	13.893	26,25
	SMP	11.127	21,02
	SMA	12.973	24,51
	Vokasi (D1 & D3)	827	1,56
	Sarjana (S1)	3.351	6,33
	S2 & S3	278	0,53
3	Status Angkatan Kerja		
	Bekerja	34.578	65,32
	Tidak Bekerja	18.356	34,68
4	Pelatihan / Kursus		
	Mendapatkan Pelatihan	5.243	9,9
	Tidak Pernah Mendapatkan Pelatihan	47.691	90,1
5	Pekerjaan Utama		
	Buruh / Karyawan	12.114	22,89
	Sektor Pertanian	2.364	4,47
	Wiraswasta	13.865	26,2
	Pekerja Bebas di Luar Sektor Pertanian	2.214	4,18
	Pekerja Keluarga (Tidak dibayar)	5.080	9,6

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah di provinsi Jawa Timur, tinggi yaitu 93,6% daripada yang tidak sekolah 6,4%. Kemudian dari tingkat pendidikan, masih banyak yang lulusan SD sebesar 26,25% , SMA 24,51%, dan terakhir lulusan sarjana S1 hanya sebersar 6,33%. Status angkatan kerja 65,32% berada dalam posisi bekerja, sedangkan 34,68% tidak bekerja. Dilihat dari pernah atau tidaknya mendapatkan pelatihan atau kursus hampir 90,1% pekerja tidak mendapatkan pelatihan/kursus. Dari keseluruhan angkatan kerja yang dilakukan survey pekerjaan utamanya adalah wiraswasta/usaha sendiri 26,2%. Menempati urutan kedua adalah buruh 22,89%. Pekerja di sektor pertanian sedikit hanya 4,47%, masih lebih banyak pekerja keluarga yang tidak dibayar.

Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan di provinsi Jawa Timur, sudah tinggi dengan ditunjukkan tingkat partisipasi sekolah yang diatas 90%. Pada tingkat pendidikan dasar menunjukkan masih banyak yang lulusan SD dengan 26,25%. Pemerintah provinsi bisa lepas tangan karena itu merupakan kewenangan daerah kab/kota masing-masing. Walaupun dalam UU 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mewajibkan bahwa 20% dari APBD digunakan untuk belanja pendidikan. Pemerintah provinsi hanya bisa memberikan atensi kepada kepala daerah agar tetap melaksanakan penggunaan APBD sebesar 20% untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terutama SD dan SMP, serta mengurangi tingkat putus sekolah karena keterbatasan biaya. Kemudian merujuk pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah kewenangan pendidikan SMA/SMK diambil alih oleh provinsi. Efek dari perubahan kewenangan tersebut dapat terlihat bahwa SMA/SMK menjadi lulusan terakhir

angkatan kerja sebesar 24,51%. Menurut Kominfo Jatim (2017) langkah pemprov untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dilakukan dengan penguatan program vokasi untuk mengejar target 70% SMK dan 30% SMA. Hal ini terkait dengan permintaan tenaga kerja terampil dari dalam dan luar negeri.

Status angkatan kerja

Angkatan kerja di Jawa timur dalam kondisi bekerja sebesar 65,32%. Ini menggambarkan bahwa persaingan angkatan kerja semakin ketat. Banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja karena tidak memiliki skill/SDM ataupun kalah bersaing dengan angkatan kerja dari provinsi lain yang masuk mencari kerja di Jawa Timur. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah provinsi Jatim membuka kawasan industry baru diluar yang sudah ada di wilayah pesisir pantura. Dengan telah dibangunnya tol trans-jawa yang melewati daerah tengah, diharapkan membuka akses investasi di wilayah jawa timur bagian tengah (Nganjuk, Madiun, Magetan, dan Ngawi).

Terlihat dari data diatas bahwa angkatan kerja tidak pernah menerima pelatihan 90,1%. Kondisi Ini langsung direspon pemerintah sejalan dengan program vokasi yang dilaksanakan pemerintah provinsi Jawa Timur pada akhir tahun 2017. Harapannya dengan adanya keterampilan yang diberikan akan memiliki nilai tambah bagi perusahaan yang akan memperkerjakannya. Dari data BPS (2018) sektor lapangan usaha terbanyak di industry pengolahan sebanyak 29,12%. Indikator ini sebaiknya digunakan pemerintah provinsi sebagai acuan, untuk pembuatan kurikulum pelatihan/ kursus ataupun di SMK. Keadaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan bahwa sektor industry yang paling banyak dan akan menyerap angkatan kerja.

Pekerjaan utama angkatan kerja di Jawa Timur menunjukkan wiraswasta/usaha sendiri paling banyak 26,2% kemudian diikuti buruh/karyawan 22,89%. Gambaran ini menjelaskan wiraswasta masih menjadi pekerjaan utama, semakin mudahnya akses informasi melalui sarana internet dan media social juga mendorong berkembangnya sektor ini. Wiraswasta tidak perlu lagi menyediakan tempat ataupun sewa tempat untuk memasarkan usahanya. Sekarang hanya bermodal akses internet semua dapat dilakukan secara online. Tinggal bagaimana pemerintah provinsi memfasilitasi sarana (platform), dan memberikan pelatihan IT bagi wiraswasta untuk menghadapi revolusi digital 4.0.

Hasil estimasi

Hasil estimasi dengan regresi logistic dari model yang pertama adalah Lbekerja = 0,583 + 0,035Xtingkat pendidikan , dan model 2 Lbekerja = 0,593 + 0,432Xpelatihan kursus.Dari kedua hasil regresi logistic tersebut memilik nilai koefisien positif. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan dan mengikuti pelatihan / kursus cenderung untuk bekerja. Kemudian untuk melihat probabilitasnya variable independen tingkat pendidikan dan pelatihan/kursus dapat dilihat dari nilai odds ratio pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil odds ratio variabel independen

Variabel Independent	*Odds Ratio*	*p-Value*
Tingkat Pendidikan	1,0357	0,001*
Pelatihan / Kursus	1,54	0,000*

*Signifikan pada level 1 %

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya tingkat pendidikan 1, 0357 kali probabilitas untuk bekerja akan semakin tinggi daripada tidak sekolah sama sekali. Hal ini sejalan dengan teori dari Ivan Berg (1970), bahwa pengusaha menggunakan ijazah pendidikan sebagai syarat untuk melakukan seleksi untuk memperkerjakan dan karyawan. Selanjutnya pelatihan / kursus 1,54 kali probabilitas untuk bekerja akan semakin tinggi daripada yang tidak pernah ikut pelatihan / kursus. Menurut Bowles dan Gintis (1975) mengemukakan teori fungsi sosial, bahwa masyarakat mempunyai suatu pekerjaan yang membutuhkan skill tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan kecakapan lebih yang dapat diperoleh salah satunya dengan mengikuti pelatihan.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan di provinsi Jawa Timur masih berada pada tingkat pendidikan atas (SMA/SMK). Sejalan dengan itu pemerintah provinsi menindaklanjuti dengan fokus peningkatan pendidikan vokasi. Hal ini terkait dengan permintaan tenaga kerja banyak dibutuhkan oleh kalangan industry pengolahan atau manufaktur. Hambatan yang dihadapi oleh pemprov adalah terbatasnya kewenangan, karena adanya UU 23 tahun 2014 tentang kewenangan pendidikan dasar dan menengah tetap berada di daerah sedangkan provinsi hanya pendidikan SMA/SMK. Apabila ditarik semua oleh provinsi maka akan terjadi keseragaman sarana infrsatrukstur dan SDM pendidikan yang merata tidak ada ketimpangan kualitas antara pendidikan di jawa timur bagian pesisir utara dan selatan. Pemerintah provinsi hanya dapat memberikan atensi kepada kepala daerah, untuk tetap menganggarkan pengeluaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD kab/kota.

Estimasi statistik menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin berpeluang untuk mendapat pekerjaan, dan angkatan kerja yang pernah mengikuti pelatihan juga lebih berpeluang mendapatkan pekerjaan. Kondisi itu telah ditindaklanjuti oleh pemrov Jatim dengan pendidikan vokasi. Peningkatan permintaan tenaga kerja terlihat dari arus investasi masuk baik PMDN dan PMA harus di respon oleh pemerintah provinsi dengan, upgrade skill angkatan melalui jalur-jalur vokasi agar dapat bersaing baik di level nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, T. (2014). Peranan Kegiatan Industri Pengolahan Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sulawesi Selatan. Jurnal Analisis , Juni Vol.3 No.1 49-56.

Bowles, S., & Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America . New York: Basic Books.

BPS. (2018). Indonesia Dalam Angka 2018. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.

BPS. (2017). Statistik Indonesia. Jakarta: BPS RI.

BPS. (2017). Survei SAKERNAS Agustus. Jakarta: BPS.

Fujita, M., & Thisse, J.-F. (2002). Economics of Agglomeration : Cities, Industrial Location, and Regional Growth. New York: Cambridge University Press.

Gujarati, D. (2004). Basic Econometric, Second Edition. New York: Mcgraw-Hill Book Company.

Jatim, K. (2017, Desember 28). Kominfo Provinsi Jawa Timur. Retrieved Agustus 4, 2019, from Kominfo Provinsi Jawa Timur: www.kominfo.jatimprov.go.id

Jorgensen, D. (1967). The Development of a Dual Economy and Surplus Agricultural Labour. O.E.P.

Suindyah D, S. (2011). PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI JAWA TIMUR. Ekuitas , 477-500.